

Perjuangan Kemerdekaan Palestina: Studi Tentang Rivalitas Fatah-Hamas dalam Menentukan Sikap Politik Palestina terhadap Israel

Muhammad Hafizh Sahashika Sudantha, Hasan Sidik

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
e-mail : sahashikasudantha@gmail.com

Abstract

The Israeli-Palestinian conflict, which began with the Balfour Declaration of 1917 and UN Resolution 181 of 1947 that facilitated the establishment of the state of Israel in 1948 by occupying part of the Palestinian territory, reflects a long struggle for a claim to territory and sovereignty. The existence of Israel as an occupying power encourages the Palestinian people's efforts to achieve absolute independence. From this effort emerged Fatah and Hamas as two main political forces that offer opposing approaches to dealing with Israel. This research uses qualitative methods. The research results show that the struggles of Hamas and Fatah have different methods, where Fatah prioritizes diplomatic strategies, and Hamas chooses a coercive approach. In addition, the two have a shared national interest, namely achieving independence. However, internal rivalry between the two worsens the prospects for Palestinian independence, regardless of the choice of approach used.

Keywords: *Fatah, Hamas, Israel-Palestine conflict, national interest, political rivalry*

Abstrak

Konflik Israel-Palestina, yang bermula dari Deklarasi Balfour 1917 dan Resolusi PBB 181 tahun 1947 yang memfasilitasi didirikannya negara Israel pada tahun 1948 dengan menduduki sebagian wilayah Palestina, mencerminkan perjuangan panjang atas sebuah klaim wilayah dan kedaulatan. Keberadaan Israel sebagai kekuatan pendudukan mendorong upaya masyarakat Palestina untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Dari upaya ini hadirlah Fatah dan Hamas sebagai dua kekuatan politik utama yang menawarkan pendekatan yang saling

berseberangan dalam menghadapi Israel. Riset ini menggunakan metode kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa perjuangan Hamas dan Fatah memiliki perbedaan cara, dimana Fatah mengedepankan strategi diplomatik dan Hamas memilih pendekatan koersif. Selain itu, di antara keduanya terdapat kesamaan kepentingan nasional, yaitu meraih kemerdekaan. Namun, rivalitas internal di antara keduanya memperburuk prospek kemerdekaan Palestina, apapun pilihan pendekatan yang dipakai.

Kata kunci: Fatah, Hamas, kepentingan nasional, konflik Israel-Palestina, rivalitas politik

Pendahuluan

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang dalam sejarah modern. Tidak hanya masalah keberadaan Israel yang dianggap sebagai invasi terhadap bangsa Palestina, pembagian wilayah melalui Resolusi PBB nomor 181 yang memberikan 45% tanah ke bangsa Arab dan 55% sisanya ke bangsa Yahudi turut memperumit situasi (Thomas, 2009). Tak bisa dipungkiri, aspek teologis juga memperdalam konflik dengan kehadiran Jerusalem sebagai simbol religius penting bagi ketiga umat agama Abrahamik. Namun lebih daripada itu, Yahudi menganggap Jerusalem sebagai Tanah Perjanjian yang harus mereka klaim kembali. Tanah ini merujuk kepada gunung Zion yang terletak di seputar Jerusalem, yang turut menginspirasi asal mula kehadiran istilah Zionisme. Di sisi lain, Jerusalem adalah tempat bagi Masjidil Aqsa, situs suci ketiga bagi umat Muslim (Ghada Hashem Talhami, 2014).

Keberadaan Israel di Palestina telah melampaui wilayah 55% yang ditetapkan PBB tahun 1948, dengan kata lain, menduduki banyak wilayah Palestina sehingga Israel menurut berbagai Resolusi PBB disebut sebagai kekuatan pendudukan. Resolusi terbaru PBB yang ditetapkan bulan September 2024 menyerukan Israel untuk mematuhi hukum internasional dan menarik pasukan militernya, segera menghentikan semua aktivitas permukiman baru, mengevakuasi semua pemukim dari tanah yang diduduki, dan membongkar sebagian tembok pemisah yang dibangunnya di dalam wilayah Tepi Barat yang diduduki. Majelis Umum selanjutnya menuntut agar Israel mengembalikan tanah dan "harta tak bergerak" lainnya, serta semua aset yang disita sejak pendudukan dimulai pada tahun 1967, dan semua properti dan aset budaya yang diambil dari warga Palestina dan lembaga-lembaga Palestina (Mishra, 2024)

Pendudukan Israel atas Palestina memunculkan gerakan perlawanan dari bangsa Palestina, dalam banyak bentuk. Dua partai politik terbesar di Palestina, yaitu Fatah dan

Hamas, pada awalnya sama-sama berjuang dengan cara politik maupun senjata. Namun sejak Perjanjian Oslo 1993, Fatah berhenti angkat senjata terhadap Israel, sedangkan Hamas masih terus mengaktifkan sayap militernya, yaitu Brigade Izzuddin Al Qasam. Sejarah gerakan perlawanan bangsa Palestina dapat dirunut ke tahun 1928, ketika Hassan Al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin di Mesir untuk menyatukan umat Muslim di bawah nilai-nilai Syariah atau nilai keislaman. Secara politis, awal pembentukan organisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan umat Muslim melawan kekuasaan Inggris saat itu (Schanzer, 2008). Namun dalam perkembangannya, cabang ideologi justru hadir di berbagai negara termasuk Palestina, sehingga melahirkan Fatah pada 1957 sebagai gerakan nasionalis Palestina di bawah kepemimpinan Yasser Arafat. Arafat mempunyai visi untuk membentuk negara sekuler jika sewaktu-waktu Palestina mendapat kemerdekaan seutuhnya dan ia memilih untuk melakukan upaya two-states solution sebagai pendekatan paling realistis pada masa itu (Abusada, 2010).

Fatah atau Harakat at-Tahrir al-Wathani al-Filasthini didirikan pada tahun 1958. Pada tahun 1964, dalam sidang Liga Arab di Kairo diputuskan untuk membentuk Dewan Nasional Palestina (DNP) sebagai badan yang menjadi representasi Palestina. Pada tahun yang sama, DNP bersidang dan memutuskan mendirikan Munazzamat at-Tahrir al-Filastiniyyah atau Palestinian Liberation Organization (PLO), yang menyatukan partai-partai politik di Palestina untuk bersama-sama berjuang meraih kemerdekaan. Anggota PLO terbesar adalah Fatah, sehingga pemimpin Fatah (saat itu dijabat Yasser Arafat) sekaligus menjadi pemimpin PLO. Awalnya, PLO angkat senjata melawan Israel, namun pasca-Oslo 1993, mereka memutuskan untuk tidak lagi melakukan perlawanan bersenjata.

Sebaliknya, Hamas berdiri tahun 1987 dan sejak awal menolak Perjanjian Oslo, tidak bergabung dengan PLO, dan tetap memilih jalur perlawanan bersenjata. Pendirian Hamas dipicu dari serangan truk Israel Defense Forces (IDF) yang menabrak kamp pengungsi di Gaza. Dari peristiwa ini, munculah suatu organisasi yang menentang keras kuasa Israel di Palestina dan menolak secara terang-terangan pendekatan yang dilakukan oleh Fatah terhadap Israel selama ini. Organisasi tersebut bernama Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah atau Hamas, yang dibentuk oleh Sheikh Ahmed Ismail Hassan Yassin atau Ahmed Yassin pada 1987.

Pada Januari 2006, Pemilu Legislatif Palestina menandai babak baru dalam sejarah politik Palestina. Hamas melalui manifesto yang menekankan isu-isu strategis seperti korupsi, pengangguran, dan keamanan, berhasil memenangkan mayoritas kursi dan mengakhiri dominasi panjang Fatah selama hampir setengah abad pada kursi kepemimpinan Palestina. Kemenangan ini membuka jalan bagi kebangkitan Hamas sebagai kekuatan politik utama dan berpotensi menggeser ideologis yang

mencerminkan perubahan aspirasi rakyat Palestina terhadap representasi negaranya. Namun di balik euforia kemenangan Hamas, rivalitas dengan Fatah justru semakin tajam, memecah persatuan nasional dan menciptakan dualisme kekuasaan yang hingga kini terus membayangi perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaan.

Riset ini akan membahas lebih dalam tentang rivalitas antara Fatah dan Hamas dalam perjuangan mereka, terutama menyoroti bagaimana pandangan keduanya terkait kepentingan nasional yang berpengaruh pada pendekatan perjuangan yang mereka ambil. Ada sejumlah penelitian terdahulu yang membahas tema serupa, antara lain (Hitman, 2022) yang menyimpulkan bahwa perbedaan visi yang terjadi antara Hamas dan Fatah mempengaruhi sistem sosial dan berpolitik Palestina, (Alsoos, 2023) yang membahas karakteristik Hamas dan peran individu dalam membentuk karakter tersebut, (Schwartz & Wilf, 2020) yang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan bangsa Palestina selama ini adalah bentuk perjuangan untuk kembali ke tanah mereka sebelumnya (apa yang disebut sebagai War of Return) yang mana hal ini didukung oleh (Gerber, 2008) dengan membahas bentuk nasionalisme Palestina saat ini adalah melawan penindasan Zionisme semenjak Deklarasi Balfour, dan (Modongal, 2023) yang menekankan bahwa agama dan perbedaan kepercayaan menjadi salah satu aspek konflik yang terjadi di Timur Tengah, terutama di Palestina. Kebaruan riset ini, berbeda dengan riset-riset sebelumnya, adalah mengaitkan proses pemilu, pandangan tentang kepentingan nasional, dan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Kekuatan Nasional dan Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional

Kekuatan atau power menjadi elemen satu elemen fundamental dalam teori Hubungan Internasional. Meskipun konsep ini sering digunakan, pemahaman mendalam terhadapnya masih terbatas. Dalam memahami kekuatan, seperti perspektif Realis yang diungkapkan oleh Morgenthau (1948) misalnya, melihat bagaimana kekuatan dalam kaitannya dengan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai pengaruh dan tujuan tertentu. Sebaliknya, Steven Lukes (2005) menawarkan pendekatan yang lebih radikal dengan mendefinisikan kekuatan melalui tiga dimensi: kemampuan untuk mengontrol tindakan, mengatur agenda, dan memanipulasi sebuah ideologis.

Namun yang paling menarik disampaikan oleh Joseph Nye (2004) yang membandingkan beberapa definisi yang digunakan oleh pakar politik untuk memahami apa arti dari kekuatan itu sendiri. Misalkan saja definisi dari Bertrand Russell yang menyandingkan konsep kekuatan pada ilmu sosial sama seperti konsep "energi" pada fisika. Pemahaman ini sulit diterapkan karena ahli fisika dapat secara jelas mengukur suatu energi yang pasti, sedangkan pada konsep kekuatan tidak bisa sesederhana

seperti ilustrasi sebelumnya. Namun Nye memperluas definisi tersebut dengan menggunakan tiga aspek dalam hubungan kekuatan, yaitu membawa perubahan, mengatur agenda, dan menggiring preferensi yang diinginkan oleh suatu aktor. Ketiga hal ini sering disalahartikan sebagai hal yang bisa dicapai hanya dengan kemampuan militer dan ekonomi suatu negara saja, suatu definisi yang diartikan oleh Nye sebagai hard power (Nye, 2004).

Aktor dalam Hubungan Internasional menyadari bahwa kekuatan tidak lagi bersifat konvensional, dalam artian mereka dapat memanfaatkan perangkat persuasif tanpa harus adanya perintah bagi pihak lain untuk mewujudkan hal tersebut. Faktor tersebut dapat berupa kebudayaan, nilai-nilai politis, citra internasional, dan faktor lainnya yang mengubah persepsi aktor lain tanpa harus memaksa mereka melakukannya. Definisi ini dipopulerkan oleh Nye sebagai soft power dan menggarisbawahi bahwa membangun hubungan, kredibilitas, dan kepercayaan sama pentingnya dengan membangun kekuatan militer ataupun ekonomi. Hal ini menjadi unggul di dunia demokrasi di mana "kekerasan" sulit diterima oleh publik dan dijadikan opsi dalam berpolitik pragmatis. Lebih mudah untuk mewujudkan suatu keinginan ketika aktor lainnya memiliki nilai yang sama daripada memberikan sanksi atau ancaman dalam proses mewujudkannya (Nye, 2004).

Hard dan soft power memiliki hubungan berkesinambungan karena keduanya adalah aspek dari kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional dari negara tersebut dengan mengubah aksi atau sikap dari aktor lain. Yang menjadi pembedanya adalah bagaimana cara untuk mewujudkan hal tersebut (Nye, 2004). Namun yang menjadi penghalang dari keduanya adalah ketika pembeda tersebut justru berasal dari dalam negara itu sendiri, seperti nilai dan kepercayaan yang berbeda antara masyarakat dan militer serta pemerintah. Dalam contoh nyata, lebih mudah bagi negara di Timur Tengah untuk mendukung satu sama lain karena memiliki landasan nilai yang sama (misalnya ideologi Islamisme), daripada negara-negara di belahan dunia lainnya yang memiliki landasan yang lebih heterogen (Ismael & Perry, 2014).

Dalam konsep Kekuatan Nasional, teori Kepentingan Nasional seakan hadir berdampingan untuk memahami prinsip dan kerangka pemikiran apa yang akan diambil oleh pengambil keputusan dalam sebuah negara sebelum menjadi kebijakan. Tentu pemahaman ini bersifat dinamis dan akan mempertimbangkan kekuatan sebagai salah satu pertimbangan utamanya. Seperti yang dikatakan oleh Frenkel (1970) dalam buku *National Interest*, ia membedakan kepentingan nasional sebagai dua alat. Yang pertama fungsi analitik, merupakan penggunaan kepentingan nasional untuk bisa menggambarkan atau menjelaskan lebih lanjut bagaimana suatu negara mengeluarkan

kebijakan luar negeri sebagai salah satu output utama dari kepentingan nasional, dan selanjutnya adalah sebagai instrumen politik itu sendiri.

Memahami Kepentingan Nasional bisa sangat berguna digunakan sebagai alat perbandingan. Satu hal yang menarik yang dibahas oleh Morgenthau (1952) adalah pengakuannya bahwa terdapat probabilitas bagi kepentingan nasional untuk direbut dari dua sumber: badan religius atau keagamaan dan organisasi internasional. Kompetisi antara satu atau keduanya jelas menentukan kepentingan dan kebijakan. Di antara perbedaan tersebut adalah keadaan politik dan ekonomi, jangkauan, dan nilai-nilai vital. Sehingga bukan tidak mungkin jika satu di antara berbagai dimensi yang telah disebutkan sebelumnya terganggu, tentu akan merubah bagaimana kepentingan terbentuk. Ia juga melihat kepentingan nasional terdiri dari dua elemen, yaitu apa yang dianggap penting dan apa yang dianggap bernilai akan menentukan kepentingan nasional itu sendiri.

Struktur Politik dan Pemerintahan Palestina

Perjuangan Palestina sejatinya merupakan upaya pemerintahan Palestina untuk membentuk konstitusi di dalam negaranya, seperti yang ditulis Brown (2003) yang mencatat bahwa setidaknya terdapat peran konstitusi di dunia Arab, terutama Palestina. Yang pertama bahwa konstitusi menegaskan kedaulatan. Brown berpendapat bahwa konstitusi di negara Arab seperti Palestina merupakan produk dari bangsa imperial sehingga hal tersebut memicu adanya reformasi. Dengan kata lain, konstitusi digunakan untuk mengatur kekuatan dan otoritas karena semenjak Perjanjian Oslo juga, Palestina memiliki berbagai elemen konstitusi yang tidak memiliki batasan yang jelas antara fungsi, peran, tanggung jawab, dan segala batasan lainnya. Serta yang selanjutnya yaitu konstitusi hadir bukan hanya untuk menegaskan otoritas dan kekuasaan tetapi juga sebagai perangkat penciptaan hukum.

Dalam konteks landasan hukum yang mengatur dasar negaranya, masyarakat Palestina tunduk kepada konstitusi yang mencerminkan sejarah panjang dan kompleks wilayah tersebut. Salah satu dokumen penting adalah Piagam Nasional Palestina (Palestinian National Charter), yang pertama kali diadopsi pada 1964 dan direvisi pada 1-17 Juli tahun 1968 oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Dokumen ini menetapkan tujuan nasional Palestina dan menggarisbawahi hak-hak rakyat Palestina. Namun dasar hukum yang lebih utuh hadir pada tahun 2003, ketika Palestina mengadopsi Undang-Undang Dasar Sementara (Interim Basic Law) sebagai pengganti Piagam Nasional (Brown, 2003).

Undang-Undang inilah yang berfungsi sebagai konstitusi de facto Palestina hingga saat ini. Sebenarnya perjanjian ini memiliki dasar pasal dan bab yang sama dengan Piagam Palestina sebelumnya, hal ini sesuai dengan Memorandum Wye yang membahas mengenai undang-undang sementara ini. Dokumen undang-undang yang baru ini memberikan kerangka kerja yang lebih baik untuk pemerintahan sementara dan menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, dan pemberian wewenang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan delapan bagian dan 121 pasal, UU ini mencakup: definisi dari negara Palestina, hak dan kebebasan publik, presiden otoritas nasional Palestina, otoritas legislatif, otoritas eksekutif, otoritas kehakiman, dan ketentuan umum dan peralihan (DCAF, 2003).

Jika kita lihat di antara elemen penting dalam konstitusi Palestina, terdapat keputusan untuk menetapkan pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Proses perubahan konstitusi di Palestina melibatkan lembaga-lembaga tertentu, termasuk Majelis Legislatif Palestina. Perubahan dapat diinisiasi oleh presiden, perdana menteri untuk nantinya disetujui oleh anggota parlemen secara ketat. Namun tentu saja, pembentukan dan implementasi konstitusi di Palestina tidak terlepas dari tantangan dan kontroversi, terutama dalam konteks konflik berkelanjutan dengan Israel dan perbedaan tujuan di dalam pemerintahannya itu sendiri.

Ada banyak faksi dan partai yang didirikan bangsa Palestina dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan dan sejak tahun 1964, didirikan PLO yang diharapkan dapat menjadi penengah dan pemersatu berbagai partai itu. PLO dan Yasser Arafat pun menjadi representasi pemimpin non-negara di berbagai forum internasional. Pada 1994, Israel mengakui PLO sebagai representatif rakyat Palestina melalui surat dari Perdana Menteri-nya kepada Ketua Komite Eksekutif PLO saat itu (Masri, 2006). Bagian utama dari PLO adalah Majelis Nasional Palestina (PNC), Dewan Pusat, dan Komite Eksekutif (Brown, 2003). PNC didirikan sebagai parlemen bagi semua Palestina di dalam dan di luar "Wilayah Palestina yang diduduki" (occupied territory) oleh Israel, termasuk Yerusalem di dalamnya. Sedangkan Dewan Pusat dibentuk oleh PNC pada tahun 1973 sebagai organ perantara antara PNC dan Komite Eksekutif. Sebagai badan legislatif, PNC bertanggung jawab dan menunjuk secara langsung anggota-anggota Komite Eksekutif sebagai eksekutif tertinggi di pemerintahan. Tugas utama eksekutif di Palestina adalah melaksanakan kebijakan dan keputusan yang ditetapkan oleh PNC dan Dewan Pusat sebelumnya. Komite ini juga bertanggung jawab untuk mengadopsi anggaran dan mengawasi fungsi departemen-departemen di dalam PLO, yang tanggung jawabnya dibagikan di antara 18 orang anggotanya (Brown, 2003).

Sedangkan Otoritas Palestina atau Palestinian Authority (PA) adalah entitas politik yang dibentuk sebagai bagian dari Perjanjian Oslo pada 1994. Tujuan

pembentukan entitas ini adalah PLO harus memberi wewenang kepada orang-orang untuk membentuk semacam dewan sekaligus konstitusi sementara yang akan menerima kekuasaan yang telah disepakati oleh Israel. Dengan kata lain, PA adalah otoritas sementara yang kekuatan dan fungsinya tertuang di dalam Oslo. Otoritas sementara ini berlaku hingga negosiasi status permanen dengan Israel yang ditargetkan terbentuk dalam beberapa tahun kedepan. Ide bahwa PA akan menjadi benih bagi negara Palestina dalam solusi dua negara (Brown, 2003).

Majelis Nasional Palestina atau Palestinian National Council (PNC) adalah legislatif tertinggi di PLO dan dianggap sebagai parlemen bagi semua Palestina, baik di dalam dan di luar wilayah Palestina. Menurut hukum di dalam PLO, PNC bertanggung jawab atas penetapan kebijakan PLO, pemilihan dan pembubaran anggota Komite Eksekutif, mengatur perubahan Piagam Nasional Palestina, dan Hukum Dasar organisasi seperti yang telah ditulis sebelumnya. Anggota PNC dipilih langsung oleh rakyat Palestina sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam hukum dasar Palestina. Oleh karena itu PNC memiliki fungsi yurisdiksi untuk mempertimbangkan segala keputusan yang akan diimplementasikan oleh PLO selama masa pemerintahannya (Masri, 2006).

Sedangkan Dewan Legislatif Palestina atau Palestinian Legislative Council (PLC) pada dasarnya adalah cabang legislatif PA. Memang tidak ada perbedaan yang cukup tegas untuk membedakan fungsi PLC dan PNC dalam segi legislatif, selain PLC lebih berfokus mendampingi PA. Dengan kata lain PNC berperan bersamaan dengan PLO dan berlaku hingga sekarang, sedangkan PA dan PLC berjalan atas dasar dan terbatas di kesepakatan Oslo saja. Yang menjadi pembeda lainnya adalah anggota PLC dipilih oleh warga Palestina yang tinggal di wilayah terokupasi saja. Oleh karena itu, berbeda dengan PNC, PLC tidak mewakili Palestina di ranah internasional dan tidak mencerminkan kehendak politik seluruh masyarakat Palestina (Brown, 2003).

Dengan sistem pemerintahan yang menaungi multipartai, kelahiran dari masing-masing partai berasal dari latar belakang yang unik antara satu dengan lainnya. Sistem ini bisa ditelusuri dari Declaration of Principles yang terjadi antara Israel dan PLO di 1993. Perjanjian ini terdiri dari berbagai tahapan dan menghasilkan detail dan kesepakatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Tahapan tersebut misalnya pada tahun 1994 disepakati tahap pertama konstruksi pemerintahan sementara Palestina di Gaza dan Jericho, yang mana ini berlanjut di September 1995 ketika pemerintahan tersebut difokuskan ke Tepi Barat dan Jalur Gaza (Ismael & Perry, 2014).

Dari kesepakatan tersebut memang minim antisipasi pembentukan majelis ataupun bagaimana otoritas tersebut beraksi dalam rutinitas sehari-hari, namun otoritas Palestina pada saat itu telah menyepakati adanya mahkamah dan tingkatan-

tingkatan di dalam pemerintahan. Salah satu dewan yang terbentuk adalah badan legislatif guna mempersiapkan Pemilu di tahun 1996. Dalam persiapannya, Arafat merepresentasikan Hukum Pemilu ke kabinet, Komite Eksekutif, dan badan legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Ketika disetujui, sistem Pemilu di Palestina justru mendorong kekuatan-kekuatan politik dari independen alih-alih mengharapkan kekuatan partai seperti negara demokrasi lainnya. Akibatnya, banyak oposisi terdiri dari partai Islam dan sayap Kiri menolak untuk berpartisipasi dalam kampanye dan Pemilu 1996. Yang tersisa adalah Fatah dan fraksi-fraksi serta tokoh independen yang mendukung ide tersebut (Bartal, 2016).

Pada pemilu pertama kali di Palestina tahun 1996, Fatah menjadi pemenang dengan menduduki mayoritas kursi legislatif dan pemerintahan eksekutif. Jika dilihat dari paradigma umum, kemenangan ini bisa dilihat sebagai keberhasilan demokrasi dan berpeluang membawa masa depan Palestina ke arah yang lebih cerah. Namun jika kita pahami, kemenangan Fatah justru menjadi kemunduran dari kestabilan politik di Palestina. Bahkan muncul pertanyaan apakah perwakilan dari PLO yang menang benar-benar bisa merepresentasikan keinginan masyarakat di depan PLC?

Brown (2003) berpendapat bahwa kemerdekaan Palestina seakan tidak sejalan dengan demokrasiya, lebih lanjut ia mengatakan "Declaring independence but losing centrality". Peran partai politik di Palestina seakan semakin minim dengan diperkenalkannya politik elektoral. Inilah alasan beberapa partai politik lebih memilih disebut sebagai "gerakan", "front" ataupun "inisiatif". Bahkan beberapa partai ini memilih untuk menghabiskan energinya dengan terjun langsung dalam aksi sosial dan kemasyarakatan daripada kampanye seperti partai-partai umumnya. Belum lagi dalam pengambilan keputusan di ranah legislatif, upaya negosiasi lebih dikedepankan daripada pemungutan suara. Hal lainnya adalah pemilihan dalam tingkat daerah juga seringkali didominasi oleh tokoh-tokoh dan bukan berasal dari kader partai. Inilah yang menjadikan sistem demokrasi di Palestina masih belum maksimal.

Baik di pemilu Presiden 1996 ataupun di tahun 2005, Pemilu seakan dirancang guna mencegah persaingan antarpartai. Fatah dan presiden yang memimpin seringkali memanipulasi jalannya pesta demokrasi tersebut dengan menunda-nunda atau mengubah undang-undang agar pemilu bisa tertahan selama mungkin. Untuk menyaingi dominasi Fatah, partai-partai akhirnya memutuskan untuk mendirikan aliansi oposisi. Salah satu yang paling terkenal adalah oposisi bernama the Alliance of Palestinian Forces (APF) yang dibangun pada tahun 1993 dengan beranggotakan sepuluh partai, diantaranya: Hamas, PIJ, PLF sayap Abu Nidal, PPSF sayap Khalid Abdul al-Majid, dan Partai Komunis Palestina Revolusioner (Levitt, 2006). Tujuan dari koalisi ini pada awalnya

adalah penolakan terhadap Konferensi Madrid di tahun 1991 antara Palestina dan Israel, namun berlanjut hingga ke berbagai kegiatan politik lainnya di Palestina (Zuhur, 2010).

Pemilu Palestina Tahun 2005-2006

Pada bulan Januari 2005, dilakukan pemilihan Presiden Otoritas Palestina (PA) menyusul wafatnya Yasser Arafat (presiden pertama PA) pada November 2004. Pemilu itu dimenangkan Mahmoud Abbas, yang sejak saat itu menjadi Presiden PA hingga saat artikel ini ditulis. Kemudian, pada bulan Januari 2006, diadakan Pemilu Legislatif, dimana Hamas secara mengejutkan memenangkan pemilu. Hamas memenangkan 74 kursi dari 132 kursi yang tersedia (Schanzer, 2008). Kemenangan ini berarti menunjukkan dua hal: indikasi kebangkitan ideologi politik Islamisme Palestina dan menghapus monopoli kekuatan Fatah yang berangsur menurun setelah hampir setengah abad menduduki kursi pemerintahan Palestina secara mayoritas.

Hamas berhasil mengambil hati masyarakat Palestina dengan memberikan manifesto yang jelas, yaitu berfokus kepada berbagai isu strategis yang menjadi keresahan publik, misalnya korupsi yang tinggi, minimnya lowongan kerja, dan faktor keamanan. Kemenangan tersebut memberikan dorongan atas kepercayaan diri serta pengakuan atas kekuatan Hamas yang seringkali dianggap tidak ada oleh oposisinya. Kemenangan ini juga memberikan harapan, bukan hanya dari masyarakat Palestina ke Hamas saja, akan tetapi juga antara Hamas dengan pemimpin sekaligus Perdana Menteri mereka saat itu, Ismail Haniyeh (Zuhur, 2010). Terdapat keinginan untuk menghancurkan kekuatan sekuler Fatah selama ini yang dianggap tidak efektif, membuat Haniyeh membentuk pemerintahannya sendiri sebagai sandingan atas kursi pemerintahan yang dibentuk Fatah pasca kemenangan Abbas pada satu tahun sebelumnya.

Dari pemikiran tersebut, Haniyeh membentuk apa yang disebut sebagai First Haniyeh Government atau pemerintahan pertama Haniyeh (JMCC, 2008). Bagi Fatah, pemerintahan yang ditunjuk oleh Haniyeh merupakan bentuk penghinaan atas dominasi Fatah selama ini. Hasilnya, terjadilah ketidakmampuan bagi kedua belah pihak untuk membentuk pemerintah yang tunggal sehingga turut muncul kebingungan dari respons internasional dan masyarakat Palestina sendiri untuk melihat siapa otoritas Palestina yang sah dan sesungguhnya.

Hal ini diperburuk ketika mereka dihadapi oleh Amerika Serikat, Israel, dan Uni Eropa menganggap Hamas sebagai organisasi teroris pasca dan bahkan sebelum kemenangan tersebut (Guardian, 2006). Konsekuensinya, ketiga pihak itu menolak

mengakui gerakan politik Hamas, yang secara tidak langsung menunjukkan minimnya pengakuan terhadap partai politik ini sendiri (Kifner & Myre, 2006). Di sisi lain, dominasi nasionalisme sekular oleh Fatah yang dianggap melemah justru memunculkan gejolak dari pemimpin Palestina sebelumnya. Kondisi ini semakin dipersulit ketika Fatah menolak untuk bergabung di kabinet, alhasil berkembanglah konflik antara Fatah dan Hamas di awal 2007.

Konflik ini berakhir dengan Perjanjian Mekah pada Februari 2007, yaitu perjanjian untuk menghentikan konfrontasi serta pertempuran internal berkelanjutan antara Fatah-Hamas di Jalur Gaza, serta dengan harapan untuk membentuk pemerintahan yang bersatu serta terbuka untuk fraksi lainnya yang ada di Palestina. Dalam perjanjiannya, terdapat empat ketentuan yang dijadikan hal dalam kebijakan pemerintahan Palestina di masa yang akan datang: mengedepankan dialog guna mencegah pertumpahan darah warga Palestina, membentuk pemerintahan persatuan nasional yang berada di Palestina, mereformasi PLO, serta mengedepankan prinsip kemitraan di tengah-tengah pluralisme politik yang terjadi di antara kedua belah pihak (Hitman, 2022).

Pada 17 Maret 2007 terbentuklah Pemerintahan Persatuan Nasional Palestina atau dikenal juga sebagai Second Haniyeh Government. Pemerintahan ini merupakan bentuk perkembangan dari Kesepakatan Mekah sebelumnya serta persiapan untuk menghadapi proses pemilu presiden dan legislatif yang diwacanakan lebih cepat atas permintaan Abbas, yaitu pada pertengahan 2007. Menghadirkan komposisi yang lebih beragam merupakan implementasi sesungguhnya dari makna persatuan pada pemerintahan tersebut. Meskipun begitu, persatuan yang hadir juga tidak turut meredakan tensi antara Hamas-Fatah di Jalur Gaza. Pada pertengahan Mei 2007 misalnya, terjadi bentrokan antara kedua fraksi sehingga memakan puluhan korban jiwa dari warga Palestina (Hitman, 2022).

Pada Juni 2007, Hamas akhirnya menguasai Gaza secara lebih leluasa dan memecat pejabat-pejabat Fatah yang berujung kepada berbagai konflik lainnya. Melihat tensi yang tak kunjung reda, akhirnya pada 14 Juni di tahun yang sama Presiden Abbas membubarkan pemerintahan persatuan tersebut dan mendeklarasikan keadaan darurat (BBC, 2007). Pengumuman tersebut berarti kekuatan Haniyeh sebagai Perdana Menteri akan diberhentikan. Namun tentu Hamas menolaknya dan menganggap bahwa merekalah yang berwenang untuk memimpin Gaza, meskipun hal tersebut terus saja ditolak oleh Abbas, Kuartet, dan tentu saja Israel.

Memahami Nasionalisme dan Perkembangan Ideologi Hamas

Untuk memahami ide nasionalisme Hamas, kita perlu merunut bagaimana proses pembentukan sebuah bangsa. (Grosby, 2005) mengatakan bahwa bangsa adalah komunitas teritorial berdasarkan kelahiran dan lahir dari berbagai proses sejarah, serta pemahamannya akan masa lalu tergantung dari anggapan mereka tentang sejarah itu sendiri. Untuk memahami sebuah bangsa, mereka harus berpartisipasi dalam tradisi yang sama, hal ini disebut juga sebagai *collective self-consciousness*. Hadirnya kepercayaan yang berbeda, hubungan sosial yang unik, dan pertimbangan lainnya membentuk kesadaran diri mengenai identitas tersebut. Hal ini turut disampaikan juga oleh (Hobsbawm, 1990) dalam bukunya yang mengatakan bahwa terdapat tiga kriteria dari sebuah bangsa: latar belakang dari negara atau sejarah, hadirnya struktur dan elemen seperti bahasa, serta yang terakhir adalah kesadaran bersama.

Bangsa merupakan produk sejarah yang terbentuk oleh manusia dengan segala dimensinya, maka bisa dipahami nasionalisme adalah ideologi yang membayangkan kelompok manusia atau komunitas dengan cara tertentu (nasionalistik), menegaskan identitasnya di atas yang lain, dan mencari kekuatan politik atas imajinasi tersebut (Spencer & Wollman, 2002). Hal ini juga sejalan dengan konsep *Imagined Community* oleh Benedict Anderson yang berpendapat bahwa suatu kelompok masyarakat dapat menganut citra dan ideologi tertentu atas dasar keadaan sosial di sekitarnya, namun Anderson mengedepankan bagaimana peran media berpengaruh penting dalam membentuk identitas tersebut (Anderson, 1983).

Kestabilan politik di Palestina pasca 1948 berada dalam kondisi yang cukup buruk. Pasalnya, dampak dari konflik 1948 adalah terusirnya 750.000 dari 900.000 populasi Palestina akibat teror dan rasa takut yang hadir pasca pendudukan Israel di sana. Banyak yang bermigrasi ke Lebanon, sebagian lainnya ke Yordania dan Suriah, serta yang berada di dalam Palestina menetap di Gaza (sebanyak 190.000 orang) dan Tepi Barat (300.000 jiwa) (Gerber, 2008). Harapan bergantung banyak atas masa depan bangsa Arab pasca pembentukan Liga Arab pada 1945 karena entitas Arab dengan berbagai latar belakang budaya dan sejarah yang sama dirasa mampu untuk membersamai berbagai permasalahan yang ada di Timur Tengah.

Namun pada kenyataannya, Liga Arab kesulitan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Organisasi ini gagal dalam mewujudkan identitas negara Arab sesungguhnya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya normalisasi antara negara Timur Tengah dengan Israel pasca 1973, ketika negara yang mereka harapkan sudah kehilangan gairah untuk berperang bersama. Hal ini tentu saja merupakan mimpi kelam penyelesaian konflik di Timur Tengah (Gerber, 2008).

Proses diplomasi Palestina dengan Israel mengalami kemunduran setelah terjadinya Intifada Pertama.¹ Gejolak yang terjadi dinilai karena Arafat tidak bisa membawa perubahan dari masa kepemimpinannya sejak tahun 1967. Pasca Intifada Pertama saja, semenjak amukan besar-besaran ini Fatah dan Arafat sempat beberapa kali membuka ruang diskusi dengan Israel dan menghasilkan berbagai perjanjian. Namun yang kembali terjadi adalah tidak adanya perubahan signifikan atas masa depan Palestina, dari sinilah Fatah menemukan pihak-pihak oposisi yang hadir sebagai kritik politik Arafat, salah satunya adalah Hamas yang melawan gagasan sekuler Fatah dengan nilai-nilai Islamismenya.

Islamisme di Palestina dipandang berbeda oleh aktor politik Palestina, bukan hanya dianggap sebagai ajaran agama Islam saja melainkan juga sebagai implementasi bentuk-bentuk strategi politik. Dalam (Roald, 1994), para Islamis melihat umat Muslim sebagai seseorang yang menjadikan Islam sebagai ide, gagasan, serta kepercayaan yang dipraktikan ke dalam hubungan personal dan sosial, ekonomi, serta politik. Para Islamis di Timur Tengah percaya bahwa salah satu tujuan mereka dalam dunia politik adalah membangun negara Islam serta menerapkan hukum-hukum bernuansa Islamiyah, yang sering disebut juga sebagai hukum Syariah.

Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa umat Muslim saat ini telah merubah nilai keislaman sesungguhnya, sehingga dibutuhkan upaya persuasif untuk merubahnya menjadi Islam sesungguhnya (*al-Islam al Hanif*). Dalam perkembangannya, Hamas secara nyata turut membangun perkembangan sosial yang berada di Palestina dengan membangun beberapa fasilitas umum seperti klinik kesehatan, sekolah, klub olahraga, dan institusi pembantu lainnya. Secara pragmatis kegiatan seperti ini sangat krusial dalam menciptakan citra serta kepopuleritasan Hamas untuk membangun doktrinasi bagi calon-calon anggotanya di masa depan (Levitt, 2006). Hal ini tidak lebih merupakan strategi yang dipilih oleh pemimpin Hamas pada saat itu, yaitu Syekh Ahmad Yassin.

¹ Gerakan Intifada Pertama terjadi 1987-1993, dimana rakyat Palestina bangkit melawan Israel; awalnya dengan aksi protes di jalanan, pemboikotan massal terhadap produk-produk Israel, pemogokan kerja, dan penolakan membayar pajak. Setelah IDF merespons dengan keras, warga Palestina membalas dengan pelemparan batu, bom molotov, dan penembakan terhadap tentara Israel. Gerakan ini awalnya didukung oleh PLO dan pada 15 November 1988, PLO mendeklarasikan berdirinya negara Palestina. Namun, deklarasi ini tidak membuat kekerasan berhenti, Israel terus menyerang dan warga Palestina membalas. Total korban selama Intifada Pertama adalah 1.000 orang Palestina tewas, 130.000 terluka, dan 600.000 orang ditangkap, dipenjara, dan mengalami penyiksaan. Sebaliknya, ada 100 warga sipil Israel dan 60 tentara IDF terbunuh, sementara 1.400 warga sipil dan 1.700 tentara terluka. AS berusaha memediasi dan akhirnya melalui perundingan rahasia di Oslo, Norwegia, lahirlah Perjanjian Oslo I pada 1993, yang antara lain PLO menyatakan tidak lagi melakukan perlawanan bersenjata (Ningsih, 2023).

Yassin sebagai pemimpin pertama dari Hamas, sangat mempengaruhi fondasi nilai yang dianut oleh Hamas. Yassin yang memiliki kontak cukup erat dengan Muslim Brotherhood cabang Mesir dan tempat ini jugalah Yassin pertama kali ditangkap oleh otoritas setempat karena dugaan adanya upaya perluasan kekuasaan Muslim Brotherhood (Ikhwanul Muslimin) di Mesir yang dianggap sebagai bentuk ancaman saat itu. Dengan mulai tersorotnya nama Yassin sebagai tokoh pergerakan dan religi pada saat itu, membuatnya mampu mendirikan Islamic Center pada tahun 1973 di Gaza (Schanzer, 2008).

Sosoknya yang religius bahkan dianggap sebagai seorang tokoh agama membuatnya mudah untuk mendapatkan pengikut dan pendengar atas ajaran-ajaran yang disampaikannya. Yassin mengembangkan jaringan logistik dan bantuan finansialnya melalui dakwah, dan dari kegiatan keagamaan ini juga ia merekrut anggota-anggota barunya. Yassin beberapa kali ditangkap Israel dengan tuduhan melakukan aksi "teror," misalnya, dituduh merancang aksi penculikan dan pembunuhan tentara Israel di tahun 1989 dengan motif untuk pertukaran sandera dengan militan Hamas yang sebelumnya ditahan Israel (Schanzer, 2008).

Pendirian Hamas dianggap oleh beberapa ahli politik seperti (Bartal, 2016) merupakan bentuk pengembangan kekuatan Yassin melalui cara yang lebih politis dan non-radikal. Menjelang akhir hayatnya, Yassin menunjuk Ismail Haniyeh sebagai pemimpin dari Hamas. Sebelumnya Haniyeh merupakan sekretaris, pendamping, hingga murid spiritual dari Yassin. Kekuatan politik yang ia punya di Hamas bermula setelah partisipasinya pada Intifada Pertama. Partisipasinya atas perjuangan Palestina dianggap menjadi nilai yang baik bagi Haniyeh (Schanzer, 2008).

Di awal kepemimpinan Haniyeh, cukup banyak hal drastis yang dihadapi oleh Hamas. Setelah kemenangan Hamas pada pemilu legislatif 2006, perubahan politik terjadi secara signifikan di teritori Palestina. Hamas yang sebelumnya tidak diakui pemerintahannya, sekarang secara resmi memegang kendali politik di Jalur Gaza. Terjadi guncangan dan dinamika yang kompleks ketika dua faksi pemerintahan (Fatah-Hamas) yang seringkali berlawanan, memerintah di satu negara yang sama. Pemerintahan yang hadir pun diwakilkan oleh dua sosok yang berbeda, yaitu Abbas sebagai presiden Palestina memegang kuasa di Tepi Barat dan Haniyeh dipilih oleh Hamas sebagai perwakilan resmi mereka dengan jabatan Perdana Menteri yang mengendalikan wilayah Gaza (Bartal, 2016).

Sikap Haniyeh dalam menghadapi Israel bisa dilihat dari pidatonya pada Maret 2007 di hadapan PLC (JMCC, 2008). Dalam salah satu bagian dari pidatonya, ia menekankan bagaimana arah politik Hamas di masa yang akan datang. Haniyeh dengan

jelas ingin menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Palestina dengan membentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya atas wilayah yang diduduki semenjak 1967. Lebih lanjut, ia meminta agar seluruh elemen pemerintahan Palestina agar mengerahkan upaya khusus untuk menolak perbatasan yang diterapkan oleh skema Amerika yang dirasa menguntungkan Israel.

Lebih lanjut, Haniyeh menekankan beberapa poin mengenai arah gerak politik Hamas menjelang pembentukan Pemerintahan Kedua Haniyeh di tahun 2007. Poin tersebut meliputi: Yerusalem sebagai ibukota negara, perlawanan terhadap kependudukan Israel, meningkatkan sektor keamanan dengan mempertimbangkan kondisi internal yang sulit antara Hamas dan Fatah, reformasi hukum, peningkatan kondisi ekonomi, perlawanan terhadap korupsi, amandemen dan pengesahan UU, perkuatan nilai-nilai Palestina, dan perencanaan dalam ranah hubungan internasional (Janssen, 2009).

Dalam berbagai arah gerak politik yang telah dipaparkan, Haniyeh sangat jelas menekankan bagaimana strategi pemerintahannya dalam menghadapi masalah yang dihadapi Palestina saat itu. Dalam beberapa poin, kita bisa melihat bagaimana Haniyeh mengedepankan perubahan yang ingin dibawa, sekaligus menjadi kritik bagi pemerintahan Fatah yang dinilai sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai perjuangan Palestina selama ini. Dari alasan ini, bisa kita pahami bahwa inilah yang menjadi dasar strategi agresi yang dilakukan oleh Hamas nantinya di masa pemerintahan Haniyeh.

Hamas melakukan perubahan strategi militernya sebagai bentuk perubahan sikap politiknya terhadap Israel. Serangan yang mereka lakukan berubah seiring dengan pemimpin yang berbeda antara sebelum dan sesudah pemilu tahun 2006. Menurut Schachter (2010), terjadi penurunan jumlah serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh militan Palestina (Hamas di antaranya), yaitu pada tahun 2002 ada 53 serangan; 2003 ada 26 serangan; 2004-2006 masing-masing 12, 8, 6 serangan; 2007 dan 2008 ada 1 serangan, dan sejak 2009 tidak ada lagi serangan bom bunuh diri.

Setelah berkuasa di Gaza pada 2007, Haniyeh memutuskan untuk melakukan strategi serangan militer secara langsung ke Israel. Hamas mengirimkan roket ke Israel dan sebaliknya, Israel dengan jet-jet tempurnya membombardir Gaza selama sehari-hari, misalnya dalam Cast Lead Operation (2008-2009), atau yang sedang berlangsung, Swords of Iron Operation (2023-sekarang). Pada tahun 2017, Haniyeh meninggalkan Gaza dan bermukim di Qatar, posisinya sebagai pemimpin Hamas di Gaza digantikan oleh Yahya Sinwar, sampai Sinwar dibunuh Israel pada Oktober 2024.

Pada tahun 2017, di bawah kepemimpinan Sinwar, Hamas merilis dokumen baru Hamas Charter, yang berisi banyak perubahan dibandingkan dengan " Hamas Charter

tahun 1988. Di antara poin penting dalam Piagam Hamas 1988 adalah bahwa Hamas merupakan sayap Ikhwanul Muslimin di Palestina dan menentang prinsip-prinsip Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang di akhir 1980-an mengadopsi opsi perdamaian sebagai pilihan strategis daripada opsi militer (Almadani 2017).

Sebaliknya, di dokumen Piagam Hamas 2017, tidak disebutkan apa pun tentang Ikhwanul Muslimin, tetapi mendefinisikan Hamas sebagai “gerakan pembebasan dan perlawanan nasional Islam Palestina, yang bertujuan untuk membebaskan Palestina dan menghadapi proyek Zionis,” dengan rujukan prinsip-prinsip, tujuan, dan sarana Islam. Dinyatakan juga dalam dokumen tahun 2017 itu bahwa konflik di tanah Palestina adalah “konflik politik, bukan konflik agama.” Di Pasal 16 disebutkan bahwa konflik dengan proyek Zionis bukanlah konflik dengan orang-orang Yahudi karena agama mereka. Hamas tidak berperang melawan orang-orang Yahudi karena mereka adalah orang Yahudi, tetapi terlibat dalam perjuangan melawan penjajah Zionis. Selain itu, dinyatakan juga pengakuan Hamas kepada PLO sebagai kerangka kerja nasional bagi rakyat Palestina di dalam dan luar negeri (Almadani, 2017).

Memahami Nasionalisme dan Perkembangan Ideologi Fatah

Meskipun ideologi dasar PLO (dimana Fatah menjadi partai terkuat dan terbesar di dalamnya) adalah nasionalisme, namun untuk meningkatkan legitimasi dan memobilisasi rakyat Palestina, pimpinan PLO mulai menggunakan simbol-simbol dan retorika Islam pada tahun 1990-an. Yasser Arafat sebenarnya adalah seorang pemimpin sekuler yang memiliki latar belakang dan ideologi kiri, namun ia juga sering menghubungkan ideologi nasionalisnya dengan Islam. Arafat mendirikan gerakan Fatah untuk pembebasan Palestina pada tahun 1959, namun setelah aneksasi Israel atas Yerusalem Timur pada tahun 1967, ia memasukkan pemikiran Muslim ke dalam ideologi nasionalisnya, antara lain dengan menghubungkan Masjidil Aqsa di Yerusalem dengan perjuangan kaum Muslimin. Dengan cara ini, Arafat berupaya mengglobalisasi perjuangan bangsa Palestina sebagai perjuangan kaum Muslim sedunia (Stoenescu 2007).

Upaya Arafat memasukkan Islam ke dalam gerakan nasional Palestina tidak sepenuhnya berhasil karena Islam bukanlah dasar ideologi politiknya. Pada akhir tahun 1980-an banyak orang Palestina yang mengalihkan kesetiaan mereka dari faksi-faksi sekuler Palestina ke organisasi-organisasi seperti Hamas atau Jihad Islam (Stoenescu 2007).

Meskipun pada Perjanjian Oslo 1993, Yaser Arafat dalam kapasitasnya sebagai Presiden Otoritas Palestina (dan sekaligus saat itu menjadi Ketua Fatah) menyetujui pengakuan terhadap Israel dan berjanji mencegah “terorisme” di Palestina (yang dimaksud adalah menghentikan gerakan perlawanan bersenjata), suara dalam Partai Fatah tidaklah tunggal. Faksi militer Fatah, Al-Aqsa Martyrs Brigades, terpecah menjadi beberapa faksi, dan sebagiannya masih tetap menyerukan perlawanan bersenjata. Sebagian faksi AMB juga ada yang tetap beroperasi di Gaza dan bersama Hamas melakukan perlawanan bersenjata bersama faksi-faksi lainnya (Memri.org, 2017).

Abbas Zaki, anggota Komite Sentral Fatah (di Tepi Barat), dalam sebuah wawancara menyatakan,

"Senjata perlawanan itu murni, dan kita harus mempertahankannya. Dari hari ke hari kita meningkatkan pelatihan dan meningkatkan kemampuan kita, [menunggu] datangnya hari yang tepat, karena kita bukanlah domba yang akan disembelih. Siapa pun yang merusak senjata perlawanan bukanlah seorang patriot, dan harus dianggap berbeda [dari seorang patriot]. Senjata-senjata ini digunakan di bawah bayang-bayang pendudukan dan sesuai dengan keputusan nasional [kita]. (Memri.org, 2017).

Sayap militer Fatah, Brigade Syuhada Al-Aqsa, yang bergerak di Gaza menyatakan,

"Brigade Syuhada Al-Aqsa terus berjuang dan melakukan perlawanan dengan segala cara dan sarana militer yang memungkinkan, untuk membela rakyat Palestina di mana pun. Brigade akan terus berada di jalur Arafat hingga mereka mewujudkan tujuan dan revolusinya, yaitu, penentuan nasib sendiri, pemulangan [para pengungsi], dan pengusiran pendudukan dari tanah kami... Tidak seorang pun dapat melucuti perlawanan – [senjata] tersebut adalah senjata rakyat Palestina dan perjuangan Palestina. Selama pendudukan di tanah Palestina terus berlanjut, senapan revolusi akan diarahkan ke dada pendudukan, hingga ia pergi atau mati" (Memri.org, 2017).

Simpulan

Konflik antara Palestina dan Israel dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Fakta bahwa bangsa Palestina merupakan bangsa yang wilayahnya masih diduduki (occupied territory) Israel merupakan faktor eksternal yang sangat

berdampak pada kondisi internal Palestina. Dua faksi politik terbesar di Palestina adalah Fatah dan Hamas. Kedua kelompok ini memiliki visi yang berbeda dalam perjuangan mereka terhadap Israel. Fatah cenderung menggunakan pendekatan diplomasi melalui pendekatan two-states solution, sedangkan Hamas mengedepankan kekuatan paramiliternya untuk mendorong one-state solution, solusi di mana Palestina berdiri seutuhnya tanpa Israel. Rivalitas ini tidak hanya menciptakan dualisme kekuasaan di Palestina, tetapi juga memperburuk kesatuan nasional yang seharusnya menjadi fondasi perjuangan bersama.

Namun demikian, di antara kedua partai ini secara umum memiliki pandangan yang sama dalam nasionalisme, yaitu menghendaki terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Meskipun di level elit, Fatah (dan PLO) menerima Perjanjian Oslo yang secara praktis menghentikan perlawanan bersenjata, namun, terjadi perpecahan internal dimana sebagian sayap militer Fatah masih tetap aktif. Hamas pun, meski secara umum memiliki pandangan yang lebih radikal dibanding Fatah, namun sejak 2017 terjadi pergeseran pandangan politik, antara lain menyatakan dalam Piagam Hamas 2017 bahwa perjuangan Hamas bukanlah perang melawan orang-orang Yahudi karena agama mereka melainkan melawan penjajahan rezim Zionis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di antara keduanya memiliki kesamaan kepentingan nasional, yaitu meraih kemerdekaan.

Daftar Pustaka

- Abusada, M., (2010). Islam versus Secularism in Palestine: Hamas vs. Fatah. Conference Paper Heinrich Böll Stiftung Berlin, [online] 1-7. Dalam: https://www.boell.de/sites/default/files/assets/boell.de/images/download_de/worldwide/2010-03-12_Dossier_Palaestine_Conference_Paper_islam_vs_secularism_Abusada_0803201.pdf [Diakses 20 Desember 2024]
- Almadani, A. (2017). The new Hamas document: An analytical reading of its development and application. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, [online] 30(4). Dalam: <https://doi.org/10.20473/mkp.V30I42017.406-417> Diakses 15 Desember 2024]
- Alsoos, I. (2023). What explains the resilience of Muslim Brotherhood movements? An analysis of Hamas' organizing strategies. *Mediterranean Politics*, [online] 28(2), 278-301. Dalam: <https://doi.org/10.1080/13629395.2021.1904368> [Diakses 15 Desember 2024]

- Anderson, B., (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. New York: Verso.
- Bartal, S., (2016). *Jihad in Palestine: Political Islam and the Israeli-Palestinian conflict*. New York: Routledge.
- BBC. (2007). Abbas sacks Hamas-led government. BBC, [online]. Dalam: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6754499.stm [Diakses 7 November 2023].
- Brown, N. J., (2003). *Palestinian Politics after the Oslo Accords: Resuming Arab Palestina*. London: University of California Press, Ltd..
- Frankel, J., (1970). *National Interest*. London: Pall Mall Press Ltd.
- Gerber, H., (2008). *Remembering and Imagining Palestine: Identity and Nationalism from the Crusades to the Present*. New York: Palgrave Macmillan.
- Grosby, S., (2005). *Nationalism: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Guardian. (2006). US cuts diplomatic ties with Hamas government. [online] Dalam: <https://www.theguardian.com/world/2006/mar/29/israel.usa> [Diakses 30 November 2023]
- Hitman, G., (2022). *The Fatah-Hamas Rift: An Analysis of Failed Negotiations*. New York: State University of New York Press.
- Hobsbawm, E. J., (1990). *Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality*. 2nd Edition ed. New York: Cambridge University Press.
- Ismael, T. Y. & Perry, G. E., (2014). *The International Relations of the Contemporary Middle East: Subordination and beyond*. 1st edition ed. Oxon: Routledge.
- Janssen, F., (2009). *Hamas and its Positions Towards Israel: Understanding the Islamic Resistance Organization through the concept of framing*. Den Haag: Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- JMCC, (2008). *Palestinian National Authority: The PA Ministerial Cabinet List March 2006-March 2007*. [online] Dalam: <http://www.jmcc.org/politics/pna/pagovmar06.htm> [Diakses 5 November 2023]
- JMCC, (2008). *PM Hanieh Speech before the PLC*. [online] Dalam: <http://www.jmcc.org/politics/pna/haniehspeechmar07.htm> [Diakses 5 November 2023]

- Kifner, J. & Myre, G., (2006). Palestinians' Hamas Leader Faces Myriad of Problems. *New York Times*, [online]. Dalam: <https://www.nytimes.com/2006/04/06/world/middleeast/palestinians-hamas-leader-faces-myriad-of-problems.html> [Diakses 1 Desember 2023]
- Levitt, M., (2006). *Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad*. Virginia: the Washington Institute for Near East Policy.
- Lukes, S., (2005). *A Radical View*. 2nd edition ed. New York: Palgrave Macmillan.
- Masri, M., (2006). *Distinction between PLO, PA, PNC, PLC, . s.l.: The Palestine Papers*.
- MEMRI, (2017). *Officials In Fatah And Its Military Wing In Gaza: We Will Not Lay Down The Arms Of Resistance Until All The Land Is Liberated*. [online] Dalam: <https://www.memri.org/reports/fatah-elements-say-palestinian-weapons-not-topic-for-discussion> [Diakses 20 Desember 2024]
- Modongal, S., (2023). *Islamic Perspectives on International Conflict Resolution: Theological Debates on the Israel-Palestinian Peace Process*. New York: Routledge.
- Morgenthau, H. J., (1948). *Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace*. 1st edition ed. New York: Alfred A. Knopf.
- Morgenthau, H. J., (1952). Another "Great Debate": The National Interest of the United States. *The American Political Science Review*, [online] 46(4), 961-988. Dalam: <https://doi.org/10.2307/1952108> [Diakses 10 Oktober 2024]
- Mishra, Vibhu. (2024). UN General Assembly demands Israel end 'unlawful presence' in Occupied Palestinian Territory. *UN News*, [online]. Dalam: <https://news.un.org/en/story/2024/09/1154496> [Diakses 20 Desember 2024]
- Ningsih, Widya Lestari. (2023). *Intifada Pertama, Perlawanan Palestina terhadap Pendudukan Israel*. *Kompas*, [online]. Dalam: <https://www.kompas.com/stori/read/2023/11/21/150000279/intifada-pertama-perlawanan-palestina-terhadap-pendudukan-israel?page=2>
- Nye, J. S., (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs.
- DCAF, (2003). *The Amended Basic Law of 2003*. [online] Dalam: <https://security-legislation.ps/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/The-Amended-Basic-Law-of-2003.pdf> [Diakses 12 Februari 2024]

- Roald, A. S., (1994). *Tarbiya: Education and Politics in Islamic Movements in Jordan and Malaysia*. Department of History of Religion.
- Schanzer, J., (2008). *Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine*. New York: PALGRAVE MACMILLAN.
- Schachter, J., (2010). *The End of Palestinian Terrorism?*. [online] Dalam: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5735895.pdf> [Diakses 20 Desember 2024]
- Schwartz, A. & Wilf, E., (2020). *The War of Return: How Western Indulgence of the Palestinian Dream Has Obstructed the Path to Peace*. New York: All Points Book.
- Spencer, P. & Wollman, H., (2002). *Nationalism: A Critical Introduction*. London: SAGE Publications Ltd.
- Stoenescu, D. (2007). *Palestinian nationalism: from secularism to Islam*. *Studia Politica: Romanian Political Science Review*, [online] d7(2), 313-330. Dalam: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-56068-8> [Diakses 15 Desember 2024]
- Talhami, Ghada Hashem. (2014). *Israel: the limits of conventional and nuclear deterrence*. Dalam: Ismael Tareq Y. Perry Glenn, *The International Relations of the Contemporary Middle East: Subordination and after*. London; New York: Routledge, pp. 111-134.
- Thomas, B., (2009). *The Dark Side of Zionism: Israel's Quest for Security through Dominance*. Lanham: Lexington Books.
- Zuhur, S., (2010). *Hamas and Israel: Conflicting Strategies of Group-Based Politics*. Dalam: N. Kardelj, ed., *Israel Vs. Hamas: The Middle East in Turmoil Series*. New York: Nova Science Publisher, Inc., pp. 1-66.